

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

Azizah, Akhmad Nikhrawi Hamdie, H. Muhammad Uhaib As'ad.

Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 16120230
Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1105026401
Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1106036001
www.zizahazizah@gmail.com

ABSTRAK

AZIZAH, NPM. 16120230 "*Implementasi Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Melalui E-Warung Dikelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin*". Bimbingan Bapak Akhmad Nikhrawi Hamdie, sebagai pembimbing utama dan Bapak H. Muhammad Uhaib As'ad, sebagai Co Pembimbing

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana melaksanakan kebijakan dari program bantuan pangan nontunai (BPNT) melalui e-warung dikelurahan alalak selatan kecamatan banjarmasin utara kota Banjarmasin.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa wawancara dan dokumentasi dengan empat orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Program Bantuan Pangan NonTunai Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang tidak krusial tapi cukup berpengaruh dan ini masih perlu diperbaiki kedepannya agar program terus berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi bantuan pangan nontunai (BPNT)

ABSTRACT

AZIZAH, NPM. 16120230 "*Implementation of the Non-cash Food Assistance Program (BPNT) through E-Warung in the South Alalak Sub-district, North Banjarmasin District, Banjarmasin City*". Guidance by Mr. Akhmad Nikhrawi Hamdie, as the main supervisor and Mr. H. Muhammad Uhaib As'ad, as Counselor

The purpose of this study was to find out an overview of how to implement the policies of the non-cash food assistance program (BPNT) through e-warung in the southern alalak sub-district of banjarmasin north of Banjarmasin.

The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collected in the form of interviews and documentation with four informants. The sample is determined using a purposive sampling technique. Data analysis uses data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of the study show that the implementation of the Non-cash Food Assistance Program Through E-Warung in the South Alalak Village, North Banjarmasin District, Banjarmasin City has been well implemented. However, there are some obstacles that are not crucial but quite influential and this still needs to be fixed in the future so that the program can continue.

Keywords: Implementation of the non-cash food assistance (BPNT)

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh setiap negara khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kondisi fisik maupun ekonomi. Berdasarkan data pusat statistik (BPS) pada Maret 2018 secara rata-rata rumah tangga miskin Indonesia memiliki 46,8 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, garis besar kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar 1.990,170/ per rumah tangga miskin per bulan. Kemiskinan yang terjadi dalam

Peraturan tersebut kemudian menciptakan sebuah inovasi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Nontunai adalah bantuan pangan yang disalurkan secara nontunai oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan. Melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan E-Warung yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman pelaksanaan BPTN).

Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI No 63 Tahun 2017, tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT. Karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian terkait penyaluran bantuan sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa good governance di Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari masih banyaknya

suatu negara memang perlu dilihat sebagai masalah yang serius karena saat ini kemiskinan membuat masyarakat Indonesia kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “pakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan juga bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat manusia” untuk mengimplementasikan pasal diatas berbagai upaya pemerintah untuk memberantas tali

permasalahan-permasalahan penyaluran bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan program BPTN ini tentu tidak bisa dibandingkan secara langsung karena program Rastra sebelumnya merupakan keberlanjutan dari program Raskin yang sudah enam belas tahun berjalan, sementara BPTN baru sebagai program percontohan.

Oleh karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk meninjau implementasi kebijakan tentang program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung dan Kendala pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Penulis menggunakan teori George C Edwards III yang memiliki variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi

Bertolak dengan latar belakang diatas penyusun mengambil judul penelitian “ **Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung Di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.**

II. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Esensi utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. 6 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program yaitu ukuran dan tujuan, kebijakan, sumber daya, karakteristik para pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan aktivitas para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut George C Edwards III menjelaskan bahwa :

Model implementasi kebijakan ini bersifat *top down*. Subarsono (2011:90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

2. Sumberdaya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah

sumberdaya yang dimiliki oleh implementator. sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya,

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan, oleh karena itu perlu nya SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (atau pelaku pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan oleh masyarakat).

Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) Melalui E-Warung

Perpres RI No 63 Tahun 2017 telah ditangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Selain itu, penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif.

penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan secara bertahap, dimulai pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih berdasarkan antara lain pada kesiapan infrastruktur pembayaran dan

jaringan telekomunikasi, kesiapan pasokan bahan pangan dan usaha enceran serta dukungan pemerintah daerah. Penyaluran bantuan pangan nontunai dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang melibatkan bank penyalur, prinsipal, dan Perusahaan *Switching*. KPM dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan bahan pangan melalui e-warung, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, menurut Perpres ini, diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial. Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Berdasarkan PERMENSOS RI No. 10 Tahun 2017 Pasal 3 Sasaran penerima keluarga harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Lalu berdasarkan PERMENSOS RI No. 10 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) sasaran penerima keluarga harapan (PKH) akses merupakan keluarga miskin dan rentan di wilayah penerima keluarga harapan (PKH) akses yang diusulkan oleh pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. ada beberapa kriteria yang mesti di ketahui.

1. Masuk dalam kategori keluarga kurang mampu

Program keluarga harapan diperuntukan untuk keluarga yang kurang mampu, jadi jika anda termasuk keluarga kurang mampu maka anda bisa menerima bantuan. PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun.

2. Komponen pendidikan

komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah.

3. komponen kesejahteraan

komponen kesejahteraan sosial berkewajiban memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan pangan lokal, dan perawatan kesehatan minimal satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makanan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

- Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa observasi.

Lokasi Penelitian

- Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Alalak Selatan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

Sumber Data Primer Dan Sekunder

- Informasi dari masyarakat yang menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) atau yang disebut Penerima Keluarga Harapan (PKH).
- Informasi dari Kelurahan Alalak Selatan

- Informasi dari Pengelola E-Warung di Kelurahan Alalak Selatan
- Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku, jurnal, majalah ilmiah dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait masalah implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Melalui E-Warung.

Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data

- Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.
- Analisis data dengan proses seleksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI MELALUI E-WARUNG DIKELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menggunakan teori Edward III :

A. Komunikasi

maka diketahui bahwa kelurahan alalak selatan kecamatan banjarmasin utara telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan cara penyampaian secara langsung dari pihak kelurahan dan dinas sosial dibantu oleh ketua RT masing masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci ibu Herlina selaku pengawas program dan e-warung tersebut bahwa peraturan yang dibuat presiden dan menteri sosial republik indonesia tentang program bantuan pangan nontunai BPNT melalui e-warung sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada setiap kelurahan semenjak dikeluarkan nya peraturan

tersebut termasuk dikelurahan alalak selatan.

“dulu setelah adanya peraturan tersebut kami dari kelurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, setelah itu sosialisasi tentang program ini terus berlanjut setiap bulan bagi penerima bantuan”(27/12/2019)

Pernyataan ibu Herlina diperkuat dengan adanya pernyataan dari masyarakat penerima bantuan yaitu ibu Rosilah sebagai informan kunci

“sudah ada sosialisasi sebelumnya oleh orang kelurahan dan dinas sosial sebagian, mereka Cuma datang dan memberikan arahan dan penjelasan itu saja” (28/12/2019)

Ditambah dengan pernyataan pengelola e-warung ibu Ernawati yang juga mendapat bantuan dan juga sebagai informan kunci menyatakan *“sebelum dibangun nya e-warung oleh pemerintah memang sudah ada sosialisasi dari sana untuk melaksanakan program BPNT melalui E-warung ini”*(28/12/2019)

Dari beberapa pernyataan informan diatas diketahui faktor sosialisasi yang sudah optimal dilakukan oleh kelurahan alalak selatan kecamatan banjarmasin utara untuk masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang diterapkan pemerintah,

B. Sumber Daya khusus nya untuk anggaran yaitu sebagai salah satu pendukung program sudah di serahkan dari pusat langsung yang bekerjasama dengan berbagai bank diseluruh indonesia, tapi tidak diketahui seberapa besar anggaran keseluruhan yang dikeluarkan pemerintah setiap bulan nya untuk warga penerima bantuan dari program BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan sendiri.

implementator atau aparatur yang melaksanakan kebijakan yang memiliki keahlian dan kemampuan agar sesuai dengan tujuan utama kebijakan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh kantor kelurahan alalak selatan memang tidak terlalu banyak tetapi ada pelaksananya karna hanya satu orang saja yg mengkoordinir untuk program BPNT melalui e-warung yaitu ibu Herlina sebagai pengawas program BPNT melalui e-warung beliau adalah informan kunci menyatakan:

“yang bekerja saya dari kelurahan dan ada beberapa tim dari dinas sosial yang membantu menjalan program ini, sisa nya ada beberapa masyarakat juga yang membantu untuk mengontrol jalan program ini contoh ya pemilik e-warung termasuk”(12/27/2019)

Selain SDM dikantor kelurahan alalak selatan, ada juga SDM yang mengelola masing-masing e-warung khusus nya dikelurahan alalak selatan salah satu hasil wawancara peneliti bersama informan kunci yaitu ibu Ernawati sebagai pengelola e-warung menyatakan:

“kalo di e-warung sini yang mengelola saya dan ada lagi empat teman saya yang tinggal disekitar sini juga, karna banyak yang dilayani juga, jadi ya banyak jua yang membantu di e-warung sini”(12/28/2019)

Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti dapat berpendapat bahwa SDM dalam melihat implementasi program bantuan pangan nontunai BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan itu sudah ada pelaksananya walaupun tidak ditetapkan berapa anggota tim yang melaksanakan program BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan itu.

Dilihat dari Sumber Daya Anggaran nya Jadi dalam melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan maka sumberdaya anggaran harus ada dan sesuai agar program terlaksana dengan baik. Sumber saya anggaran yang

dikeluarkan pemerintah untuk program BPNT melalui e-warung di kelurahan alalak selatan dalam mendukung kebijakan tersebut informan kunci ibu Ernawati menyatakan :

“kalo masalah dana saya tidak mengetahui soal nya kan sistem nya digesek kartu nya berarti dari bank langsung itu, kalo isi saldo kartu per orang yang dapat itu Rp110.000 isinya digesek tiap bulan buat ngambil bahan pangan nya yaitu beras dan telur”(12/28/2019)

Pernyataan diatas juga didukung oleh ibu Herlina sebagai pengawas program BPNT melalui e-warung

“anggaran itu sudah dari pusat nya disini kami hanya mengelola jalan nya program, karna itu langsung bekerjamasa dengan berbagai bank”(12/27/2019)

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa sumber daya anggaran untuk program BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan memang ada anggaran nya tetapi tidak diketahui berapa banyak yang dikeluarkan pemerintah untuk kelurahan alalak selatan setiap bulan nya untuk mendukung berjalan nya program, karna ini juga bekerjasama langsung dengan bank, jadi mungkin masalah anggaran tidak transparan.

C. Disposisi dapat diketahui bahwa para informan menjelaskan tentang program BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan itu berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh implementator atas program itu, bisa dibilang program ini sudah mencapai tujuan nya

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukan dan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan . sikap dari informan kunci ibu Hatmah dan Ibu Rosilah dalam menanggapi adanya program BPNT melalui e-warung menyatakan bahwa:

“sudah beberapa tahun berjalan program ini sangat bagus kalo bisa terus berlanjut”(12/28/2019)

“bagus saja ada bantuan seperti, sangat membantu buat saya, semoga terus ada program seperti ini”(12/28/2019)

Penjelasan tersebut didukung oleh ibu Ernawati sebagai pengelola e-warung dikelurahan alalak selatan menyatakan bahwa

“bagi saya ini baik buat masyarakat tidak mampu, bagus aja pemerintah membuat program seperti ini, mudahan berlanjut saja program membantu seperti ini”(12/28/2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa para informan menjelaskan tentang program BPNT melalui e-warung dikelurahan alalak selatan itu berjalan dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh implementator atas program itu, bisa dibilang program ini sudah mencapai tujuannya

D.Struktur Birokrasi peneliti mengambil kesimpulan bahwa kelurahan alalak selatan sudah menjalankan SOP sebagaimana seharusnya sudah dikeluarkannya peraturan presiden dan menteri sosial tentang program bantuan pangan nontunai melalui e-warung dalam menjalankan kebijakan tersebut

Dalam hasil wawancara dengan informan yaitu ibu Herlina dan ibu Ernawati menyatakan:

“kami mengerjakan ini sesuai arahan dan prosedur dari atasan, sehingga jarang terjadi kesalahan dilapangan”(12/28/2019)

“dalam mengelola e-warung ini saya bersama teman teman yang lain mengikuti apa yang diarahkan dari pihak kelurahan dan beberapa dari dinas sosial”(12/28/2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kelurahan alalak selatan sudah menjalankan SOP sebagaimana seharusnya sudah dikeluarkannya peraturan presiden dan menteri sosial

tentang program bantuan pangan nontunai melalui e-warung dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2. KENDALA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN ALALAK SELATAN KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

Pertama sumber daya manusia dimana SDM di kelurahan alalak selatan tidak mendukung dalam pelaksanaan program BPNT ini, Selanjutnya sumber daya anggaran yaitu anggaran yang dikeluarkan pemerintah seberapa besar untuk program bantuan BPNT melalui e-warung ini untuk masyarakat tidak dijelaskan secara rinci berapa perbulannya. Kemudian sikap, kurang adanya ketegasan dari pihak kelurahan dalam penerapan program sehingga tidak ada sanksi, walaupun tidak ada pelanggaran dalam penerapan program BPNT ini tetap saja harus ada sanksi untuk meantisipasi pelanggaran yang terjadi.

V. KESIMPULAN

Dalam pendistribusian program BPNT melalui e-warung sudah cukup optimal dan tepat sasaran, dan pihak kelurahan selalu berkoordinasi kepada pihak dinas sosial yang sekaligus juga pelaksana dari program tersebut sehingga sejauh ini program tersebut bisa dianggap berhasil untuk membantu warga miskin yang ada dikelurahan alalak selatan.

walaupun masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat untuk melaksanakan program BPNT melalui e-warung yaitu Yang pertama faktor **sumber daya manusia, sumber daya anggaran**, dan **sikap** dari pengelola program.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya harus lebih peka dalam memantau implementasi program Bantuan Pangan Nontunai Melalui e-warung ini dengan cara memperbanyak SDM dalam mengelola program ini Khusus nya dikantor kelurahan Alalak Selatan agar dalam menjalankan kebijakan lebih efektif dan terus berkelanjutan, dan Anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus jelas dan transparan agar tidak terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan program BPNT tersebut.

2. Pemerintah juga sebaiknya membuat peraturan untuk setiap implementator dalam mengelola program BPNT ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, jika pun terjadi harus diberi saksi tegas dari pemerintah sesuai dengan aturan yang ada untuk memantisipasi pelanggaran tidak terulang lagi dan terus melakukan perbaikan atau evaluasi agar program ini terus berjalan berkelanjutan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr.Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Peneliti Pemula*, Bandung 2004 Ditulis pada hari senin tanggal 6 November 2019 pukul 21.08 WITA

Edoardus E. Maturbongs: *Konsep Dan Model-Model Implementasi Kebijakan (e-book)* ditulis pada hari selasa tanggal 5 November 2019 pukul 12.08 WITA

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia,
Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin, Jakarta, 2011. Ditulis pada hari selasa tanggal 5 November 2019 pukul 12.08 WITA

Putra Fadillah dan Anwar Sanusi, *Analisis Kebijakan Publik neo-institutionalisme*, Depok 2019 Ditulis pada hari senin tanggal 6 November 2019 pukul 21.08 WITA

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*, Bandung:

ALFABETA, 2015. Ditulis pada hari senin tanggal 6 November 2019 pukul 21.08 WITA

Undang-Undang dan Peraturan

UUD 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “ pakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 diakses pada hari senin tanggal 4 November 2019 pukul 14.21 WITA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. diakses pada hari senin tanggal 4 November 2019 pukul 14.30 WITA

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui Elektronik Warung dalam pasal 1 ayat 1 diakses pada hari senin tanggal 4 November 2019 pukul 14.35 WITA

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1, diakses pada hari senin tanggal 4 November 2019 pukul 14.42 WITA

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kepala Biro Hukum Dan Kemensos 2016. diakses pada hari kamis tanggal 7 November 2019 pukul 16.02 WITA

Peraturan presiden RI No 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai di akses pada senin tanggal 4 November 2019 pukul 15.21 WITA

Jurnal

Rachman Benny, Adang Agustian, Wahyudi, “Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.16 No.1 (Juni 2016), h.

1. diakses pada hari jumat tanggal 22 november 2019 pukul 20.09 WITA

Rahmatt Usup Hidayat, “*Distribusi Beras Bulog Pasca Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai*”. *Jurnal Logistik Indonesia*, Vol. 2 No.2 (Oktober 2018), h.1. diakses pada hari jumat tanggal 22 november 2019 pukul 20.09 WITA

Skripsi

Sulukin Ahda Nisa “*Analisi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*” (Juni 2019). Diakses pada jumat tanggal 22 november 2019 pukul 20.09 WITA.

Surya Ika Kharismawati. 2018. *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. [skripsi]. Surabaya. Universitas Negeri Surabaya: Diterbitkan.* diakses pada hari kamis tanggal 7 November 2019 pukul 15.20 WITA.

Internet

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. *Kementerian Bappenas, Kementerian Sosial RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden RI, TN2PK.* diakses pada hari jumat tanggal 8 November 2019 pukul 19.30 WITA

Statistik Indonesia. *Badan Pusat Statistik Indonesia.* diakses pada hari jumat tanggal 8 November 2019 pukul 21.00 WITA

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Materi Sosialisasi BPNT 2018. diakses pada hari jumat tanggal 8 November 2019 pukul 21.20 WITA

<https://pengertianahli.id/2019/01/pengertian-kemiskinan-penyebab-dan-dampaknya-bagi-masyarakat.html>

<https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses pada hari selasa tanggal 5 November 2019 pukul 10.20 WITA.